



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# APBD Kisruh, 600 PHL Tak Digaji

**JAKARTA (Pos Kota) - Sebanyak 600 pekerja harian lepas (PHL) di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Tugu Proklamasi belum menerima upah dua bulan terakhir. Hal itu sebagai dampak kisruh rancangan APBD DKI Jakarta. Pada sisi lain, bulan depan, Monas perlu berbenah menyambut peringatan ke-60 Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika.**

Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Rini Hariyani mengatakan ada 600 orang PHL yang belum menerima upah dua bulan terakhir. Mereka bekerja sebagai tenaga kebersihan dan keamanan.

"Sesuai kontrak, mereka menerima upah minimum provinsi yakni Rp 2,7 juta per bulan. Nah, sudah dua bulan kami tidak bisa membayarkan upah mereka karena belum ada anggaran yang cair," ucapnya, Senin (9/3), seraya berharap pertengahan Maret ini kisruh APBD bisa segera tuntas.

Selain upah, perbaikan fisik di kawasan Monas juga tersendat. Penggantian lampu, misalnya, baru bisa dilakukan apabila masih ada stok lampu. "Tapi, kalau ada instalasi di lampu yang rusak, ya, terpaksa dibiarkan dulu karena belum ada anggaran untuk perbaikan lampu," ujarnya.

Padahal, April mendatang Monas perlu berbenah menyambut peringatan ke-60 KTT Asia Afrika. "Kami akan berusaha mencari dana tanggung jawab perusahaan (CSR) untuk perbaikan pencahayaan dan pengecatan di Monas ini," sambung Rini.

### UTANG KE SPBU

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, Marsigit, menjelaskan upah untuk PHL kebersihan di Jakarta Pusat sebagian sudah dibayarkan. Dananya dari dana percepatan pemerintah daerah. Hari Senin pekan lalu, dana untuk upah bulan Januari sudah cair. Untuk bulan Februari cair sekitar tanggal 10, bulan ini.

Persoalan lain adalah belum adanya dana untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) truk dan mobil bak terbuka pengangkut sampah. "Kami harus berangkat ke SPBU. Sebulan, butuh biaya Rp1,2 miliar untuk BBM 157 truk dan mobil bak terbuka itu. Beberapa kali, pihak SPBU menegur karena utang kami sudah banyak. Tapi, ya, kami hanya bisa memohon agar dibolehkan berutang," katanya. (st)

**“  
Anggaran Belum Cair, Sudah Dua Bulan Kami tidak bisa Bayar**

*-Rini, Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas -*

**”**